

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Pembelajaran *Civic(s) Education* yang dilaksanakan di Indonesia mempunyai beberapa perbedaan dan persamaan dengan pembelajaran *Civic(s) Education* di Jepang, dimana dalam pola pembelajaran, tujuan pembelajaran dan aspek-aspek lainnya terdapat suatu kemiripan dan perbedaan yang terjadi terkait perbandingan antara pembelajaran *Civic(s) Education* di Indonesia dengan di Jepang. Terdapat beberapa faktor yang terjadi perihal persamaan dan perbedaan yang terjadi mengenai sistem pendidikan maupun pembelajaran *Civic(s) Education* di Indonesia dengan Jepang, diantara lain dari segi sejarah, hubungan diplomatik, kerja sama bilateral, pertukaran pelajar, dll. Namun begitu masih ada perbedaan yang mencolok mengenai sistem pendidikan dan pembelajaran *Civic(s) Education* di Indonesia dengan Jepang. Sekolah di Indonesia dewasa ini belum mampu menyentuh tiga ranah tujuan pendidikan (*cognitive domain*, *affective domain* dan *psychomotor domain*) secara utuh. Hal ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembelajaran *Civic(s) Education* di sekolah saat ini masih bersifat *teacher centred learning* (pembelajaran berpusat pada guru). Pola pembelajaran seperti ini yang menyebabkan guru dominan menggunakan metode ceramah pada pembelajaran *Civic(s) Education*, sehingga siswa hanya dapat mendengarkan materi dari guru saja. Menyikapi hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan sebuah perubahan dengan menekankan pola pembelajaran *Civic(s) Education* yang berpusat pada siswa (*student centred learning*). Agar dapat merealisasikan pola pembelajaran tersebut sekaligus memberikan pengalaman belajar yang baru kepada siswa, maka dapat dilakukan pengembangan pembelajaran *Civic(s) Education* berbasis pengalaman peserta didik.

Berbeda dengan pola pembelajaran *Civic(s) Education* di Jepang yang lebih menekankan kepada aspek-aspek moral dan karakter yang berbeda-beda dari setiap peserta didik yang ada. Dimana guru tidak selalu menjadi pusat pembelajaran, tetapi lebih kepada fasilitator yang nantinya membantu peserta

didik dalam mempelajari suatu materi yang diberikan oleh guru. Selain itu pembelajaran *Civic(s) Education* di Jepang sangat menekankan pada aspek *living experience* dan sangat menonjolkan dari ranah afektif dan psikomotor peserta didik. Pembelajaran *Civic(s) Education* di Jepang bertujuan untuk membangun kompetensi warganegara agar dapat mempunyai rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap negara dan kaisar.

2. Simpulan Khusus

Berdasarkan uraian pada simpulan umum di atas, maka selanjutnya akan diuraikan beberapa simpulan khusus sebagai jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang diajukan di dalam penelitian ini. Ada pun simpulan khusus dalam penelitian yang mengkaji perbandingan pembelajaran *Civic(s) Education* di Indonesia dengan Jepang adalah sebagai berikut:

- a. Pembelajaran *Civic(s) Education* di Indonesia untuk persekolahan sangat erat kaitannya dengan dua disiplin ilmu yang erat dengan kenegaraan, yakni Ilmu Politik dan Hukum. Kedua ilmu itu terintegrasi dengan humaniora dan dimensi keilmuan lainnya yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Karena itu, *Civic(s) Education* di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart dan good citizen*). Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Indonesia merupakan negara demokratis, tak heran jika warga negaranya dituntut untuk berperilaku aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tercipta masyarakat yang aktif, maka sejak sekolah dasar kita tentu sudah mendapatkan materi mengenai pendidikan kewarganegaraan. Hal itu terus berlanjut hingga menginjak dunia perkuliahan tingkat awal. Pendidikan kewarganegaraan secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dalam seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Sedangkan pembelajaran *Civic(s) Education* di Jepang yang dikenal dalam terminologi *social studies, living experience and moral education*,

berorientasi pada pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan warga negara berkaitan dengan upaya untuk membangun bangsa Jepang. Konteks kelahiran *Civic(s) Education* di Jepang dapat ditelusuri, terutama setelah Perang Dunia kedua (1945). Pada masa itu, perhatian pemerintah Jepang terhadap pendidikan mulai menunjukkan peningkatan. Pendidikan menjadi pusat perhatian pemerintah sebagaimana direncanakan sejak periode Meiji (abad ke-19). Periode setelah kekalahan Jepang ini, merupakan titik balik yang sangat penting bagi pendidikan di Jepang. Pendidikan Jepang mengubah orientasinya dari yang bersifat militer ke arah pendekatan yang lebih demokratis. Demikian pula perubahan dirasakan dalam *Civic(s) Education*, mata pelajaran ini telah bergeser penekanannya dari pendidikan untuk para warga negara dan pengajaran disiplin ilmu-ilmu sosial yang terkait dengan upaya untuk membangun bangsa Jepang, ke arah *Civic(s) Education* untuk semua warga negara. Sedangkan dalam proses pola pembelajaran yang dilakukan Jepang menerapkan 3 prinsip yaitu; *Tanoshii Jugyuu* (Kelas harus menyenangkan), *Wakaru Ko* (Anak harus mengerti), dan *Dekiru Ko* (Anak harus bisa).

- b. Pembelajaran *Civic(s) Education* di Indonesia bertujuan untuk membangun karakter (*character building*) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab. Tujuan akhir dari *Civic(s) Education* adalah warganegara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh-kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisitasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif. Para peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya yang cerdas dan baik. Proses

pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui partisipasi sosial (*socio-participatory learning*), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Sedangkan tujuan pembelajaran *Civic(s) Education* di Jepang bertujuan mempersiapkan setiap individu untuk dapat terlibat dalam secara aktif dalam masyarakat, dan menggunakan budaya umum dalam setiap hal. Penekanan *Civic(s) Education* telah diubah dari mengutamakan pengetahuan umum tentang bangsa Jepang kepada kemampuan itu untuk membangun masyarakat. Pada periode ketiga ini, *Civic(s) Education* Jepang sebagian besar diterapkan sebagai “kewarganegaraan (*civics*)” dalam sekolah tingkat atas, dan sebagai “studi sosial” dalam sekolah tingkat menengah. Landasan Pengembangan *Civic(s) Education* di Jepang tidak dapat dilepaskan dari konsep warga negara (*komin, citizen*) dan kewarganegaraan (*citizenship*). Oleh karena itu, penting diketahui bagaimana konsep-konsep tersebut dikonstruksi.

- c. Mata pelajaran di Jepang tidak seberagam yang dikembangkan di Indonesia, jumlahnya tidak banyak, sehingga berbagai mata pelajaran tersebut diberikan pada waktu yang berlainan setiap hari selama seminggu, maka jarang ada jadwal pelajaran yang sama pada hari yang berbeda. Secara umum tujuan *Civic(s) Education* Jepang lebih mengarah pada pengembangan kepribadian individu secara utuh, menanamkan jiwa yang bebas dan bertanggungjawab, bertoleransi untuk menghargai antar individu. Prinsip pendidikan yang ada di negara Jepang lebih bersifat humanis berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan ilmunya benar-benar *real* dapat diaplikasikan dan dibutuhkan di kehidupan nyata. Mata pelajaran *Civic(s) Education* di Jepang secara umum terpisah dengan Ilmu Sosial (*Separated*). *Civic(s) Education* di Jepang mempunyai peran yang sama dengan di Indonesia yaitu sebagai mata pelajaran pengembangan karakter dan nasionalisme warganegara. Sedangkan perbedaan yang menyolok pada sistem pembelajaran *Civic(s) Education* di kedua negara ini ada dalam tujuan umum pembelajaran *Civic(s) Education*

mengutamakan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individual, dan menanamkan jiwa yang bebas. Sedangkan di Indonesia *Civic(s) Education* bertujuan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jepang tidak memasukkan mata pelajaran pendidikan agama di semua jenjang persekolahan (memisahkan pendidikan agama dengan persekolahan), sedangkan di Indonesia pendidikan agama adalah mata pelajaran yang wajib untuk setiap jenjang persekolahan. Dilihat dari kurikulum yang dikembangkan dapat dikemukakan beberapa hal yaitu kurikulum *Civic(s) Education* pada jenjang persekolahan di Jepang tidak membebani anak, karena anak tidak dijejali materi-materi pelajaran secara kognitif tetapi lebih pada pengenalan dan latihan ketrampilan hidup yang dibutuhkan anak untuk kehidupan sehari-hari, seperti latihan buang air besar sendiri, gosok gigi, makan, dan lain sebagainya. Sedangkan kurikulum di Indonesia telah berorientasi pada pengembangan intelektual anak.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan, penulis mengharapkan ada beberapa implikasi terhadap *stakeholder* yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun implikasi penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- a. Pola pembelajaran *Civic(s) Education* di Jepang dapat memberikan dampak positif apabila dijadikan sebagai bahan referensi bagi penerapan nilai-nilai moral dan karakter di Indonesia. Hal ini dikarenakan metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran *Civic(s) Education* menekankan kepada *living experience* peserta didik dalam setiap pembelajaran yang diberikan guru di sekolah sehingga peserta didik dalam memahami materi akan mengalami dan mengetahuinya dari pengalaman yang dirasakannya.
- b. Penerapan pola pembelajaran *Civic(s) Education* di Jepang ke dalam pola pembelajaran *Civic(s) Education* dapat berimplikasi pada pembelajaran yang berpusat pada siswa yang terjadi di Indonesia selama ini. Hal ini akan

mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran serta memiliki pengalaman belajar yang baru dari hasil pengalamannya sendiri dengan dibantu guru sebagai fasilitator.

- c. Penerapan pola pembelajaran *Civic(s) Education* di Jepang ke dalam pola pembelajaran *Civic(s) Education* di Indonesia dapat berimplikasi pada penguatan kompetensi warganegara peserta didik. Selain dapat memperkuat kompetensi pengetahuan, pembelajaran berbasis *living experience* seperti ini juga dapat merangsang keterampilan siswa melalui pengalaman langsung yang berkaitan dengan materi pembelajaran, sehingga siswa secara tidak langsung dapat merefleksikan makna pembelajaran yang dialami ke dalam kehidupan sehari-hari.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan, penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, sekolah, guru Pendidikan Kewarganegaraan serta bagi peneliti berikutnya.

1. Bagi Pemerintah :

- a. Dinamika pengembangan kurikulum yang dirasa begitu cepat seiring periodisasi pemerintahan yang satu ke periode selanjutnya hendaknya tidak hanya disesuaikan dengan perkembangan modernisasi dan IPTEKS saja, akan tetapi harus diimbangi pula dengan pengembangan pola dan metode pembelajaran ke dalam kurikulum. Hal ini perlu ditanamkan dalam setiap mata pelajaran, khususnya *Civic(s) Education*, sebab dalam mempelajari mata pelajaran *Civic(s) Education* tidak hanya berdasarkan konsep dan teori belaka namun harus berdasarkan pada pengalaman peserta didik.
- b. Pendidikan karakter dan revolusi mental yang hingga saat ini digalakan oleh pemerintah sebaiknya memperhatikan pula alokasi waktu yang dimiliki oleh mata pelajaran inti di sekolah, salah satunya *Civic(s) Education*, yang hingga saat ini dirasa masih minim. Pemerintah hendaknya memberikan tambahan alokasi waktu tambahan agar amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang menyatakan peranan

Civic(s) Education untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air terhadap peserta didik dapat teroptimalkan.

2. Bagi Sekolah :

- a. Dalam rangka meningkatkan nasionalisme di tengah derasnya arus globalisasi, khususnya bagi generasi muda, diharapkan sekolah dapat membuat sebuah inovasi pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran *Civic(s) Education* untuk kalangan pelajar dengan mengangkat nilai-nilai religius dan nasionalisme. Pembuatan inovasi pembelajaran semacam ini dapat digunakan sebagai pola dan metode bagi pembelajaran *Civic(s) Education* di sekolah.
- b. Dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusional dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah diharapkan mampu mengemban amanat konstitusi negara dalam pola pengembangan pembelajaran yang berlandaskan semangat 4 pilar kebangsaan agar tertanamnya semangat bela negara dan rasa memiliki terhadap negara Indonesia. Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, banyak kalangan yang kurang peduli terhadap permasalahan bangsa ini. Hal ini mengingat dampak globalisasi yang terjadi, oleh karena itu sekolah dituntut untuk semakin menguatkan rasa nasionalisme peserta didik dalam pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran.

3. Bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan :

- a. Seiring dengan pesatnya perkembangan IPTEKS, pengembangan model pembelajaran *Civic(s) Education* saat ini banyak menggunakan fasilitas teknologi khususnya internet. Filterisasi yang sangat minim mengakibatkan beberapa gejala terjadinya dekadensi moral pada peserta didik sangat rentan terjadi. Oleh sebab itu, pengembangan pembelajaran *Civic(s) Education* berbasis *living experience* seperti yang diterapkan di Jepang perlu dikembangkan agar dapat mengimbangi penggunaan model pembelajaran berbasis teknologi. Sebab selain dapat memfilter pengaruh teknologi, pengembangan model pembelajaran seperti ini akan sekaligus

meningkatkan potensi peserta didik yang ada sebagai sumber potensi dalam membangun tata nilai kehidupan masyarakat.

- b. *Civic(s) Education* sebagai mata pelajaran berperan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Oleh sebab itu pembelajaran *Civic(s) Education* di sekolah tidak hanya menekankan pada pengembangan aspek kognitif siswa saja, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik. Agar dapat mencapai itu guru harus dapat mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, salah satunya melalui pembelajaran *Civic(s) Education* berbasis *living experience* yang diterapkan di Jepang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya :

- a. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ini, dimungkinkan masih banyak aspek persamaan dan perbedaan yang terdapat pada perbandingan pembelajaran *Civic(s) Education* di Indonesia dengan Jepang yang dapat digali pola dan metode-metodenya. Karena itu, diharapkan ada peneliti selanjutnya yang mengkaji perbandingan pembelajaran *Civic(s) Education* yang belum ditemukan dalam hasil penelitian ini.
- b. Selain sebagai pengembangan pembelajaran *Civic(s) Education* berbasis *living experience*, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan metode yang digunakan di Jepang tersebut ke dalam aspek *Civic(s) Education* lainnya agar dapat mengembangkan temuan-temuan baru, khususnya dalam pengembangan kompetensi kewarganegaraan.